

**MODEL PENDAYAGUNAAN PERPUSTAKAAN DESA
UNTUK PENINGKATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DESA JIWOREJO,
KECAMATAN JIKEN, KABUPATEN BLORA**

**UTILIZATION MODEL OF VILLAGE LIBRARY
FOR THE IMPROVEMENT PUBLIC EDUCATION IN THE JIWOREJO VILLAGE,
JIKEN DISTRICT, BLORA REGENCY**

Arif Sofianto

*Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jateng
Jl. Imam Bonjol 190 Semarang. Telp. 024 3540025. Fax. 024 3560505*

Email: areef_sofiant@yahoo.com

Diterima: 3 Pebruari 2015, Direvisi: 18 Pebruari 2015, Disetujui: 6 Maret 2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1). Memahami kondisi perpustakaan yang ada di Desa Jiworejo, 2). Menganalisis kebutuhan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan di Desa Jiworejo, 3). Menganalisis upaya yang dibutuhkan untuk optimalisasi perpustakaan di Desa Jiworejo sebagai wahana pendidikan masyarakat. Penelitian ini bersifat terapan dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini adalah; 1). Kondisi perpustakaan Desa Jiworejo belum berfungsi optimal karena minimnya kerjasama, sumberdaya, koleksi, layanan, akses masyarakat, dan budaya baca. 2). Upaya yang perlu dilakukan adalah menjalin kerjasama, menggali potensi sumberdaya, penambahan koleksi, penambahan layanan, membuka akses masyarakat, serta peningkatan budaya baca masyarakat. 3). Upaya optimalisasi perpustakaan sebagai wahana pendidikan masyarakat dengan memperbaiki kapasitas perpustakaan, memberikan layanan tambahan yang bertujuan menarik minat masyarakat berupa pelatihan keterampilan, pengetahuan dan hiburan.

Kata kunci: *perpustakaan, pendidikan masyarakat, Desa Jiworejo*

ABSTRACT

. This study aims to 1). Understanding the conditions that exist the library in the village Jiworejo, 2). Analyzing needs repairs that need to be done to optimize the function of the library in the village Jiworejo, 3). Analyzing the effort required to optimize the library in the village Jiworejo as a means for public education. This research is applied with a qualitative approach. The data analysis technique used in this study is an interactive model developed by Miles and Huberman. The conclusion and recommendation of this study is; 1). Conditions the library in the village Jiworejo was not function optimally because of the lack of cooperation, resource, collections, service , community acces , and reading culture . 2) . Efforts need to do is to establish cooperation , explore the potential of the resource, the addition of the collection, increasing of the service, open access to the public, as well as improving the reading culture of society. 3). Efforts to optimize the library as a means for public education by improving the capacity of the library, providing additional

services aimed at attracting the public in the form of skills training, knowledge and entertainment.

Keywords: *libraries, community education, village Jiworejo*

PENDAHULUAN

Buku atau bahan bacaan merupakan jendela ilmu pengetahuan. Sebagaimana disampaikan oleh Djamarah (2002:41), bahwa membaca adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan selama belajar di sekolah atau perguruan tinggi. Kecenderungan masyarakat saat ini sudah mulai beralih dari masyarakat berbudaya lisan menuju masyarakat komunikasi berbudaya tulis, sehingga memperkuat kebutuhan manusia akan bahan bacaan. Di sisi lain, pendidikan untuk mencapai kemajuan dengan cara memberdayakan para anggota masyarakat agar memiliki mutu kapasitas dan kapabilitas diri sesuai yang diharapkan (Arif Rohman, 2009:1). Dalam *World Summit of Information Society* (WSIS) tentang pencapaian MDG's, bahwa perwujudan masyarakat informasi (*information society*) yang inklusif atau terbuka dimana perpustakaan menjadi ranah publik (*public domain*) sebagai akses ke informasi dan pengetahuan dimana kemampuan semua orang untuk mengakses dan menyumbangkan informasi, gagasan dan pengetahuan secara terbuka (Pasaribu, 2014). Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perpustakaan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat modern saat ini.

Perpustakaan merupakan fasilitas utama penyediaan bahan bacaan publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah, penyelenggara pendidikan dan pihak terkait lainnya. Menurut Nazaruddin (2002), kebijakan pemerintah terkait pengembangan perpustakaan secara umum di Indonesia sudah lumayan menggembarakan, yaitu dengan lahirnya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Menurut regulasi tersebut, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Khusus terkait Perpustakaan Desa/Kelurahan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Perpustakaan Desa/Kelurahan. Aturan tersebut sudah mengamanatkan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan. Berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2011 dari jumlah desa yang terdapat di seluruh Indonesia (lebih dari 73.000 unit) belum sampai 10% diantaranya memiliki perpustakaan desa (Pedoman Perpustakaan Desa, Perpustnas RI, 2001).

Perpustakaan desa memiliki peran strategis dalam menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat desa yang memiliki keterbatasan akses. Akan tetapi, pengembangan perpustakaan desa mengalami beberapa kendala, baik kebijakan maupun teknis. Menurut Pasaribu (2014), ada beberapa faktor permasalahan pengembangan perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca masyarakat. *Pertama*, rendahnya produksi buku nasional. *Kedua*, inkonsistensi kelembagaan perpustakaan daerah dan rendahnya SDM pengelola perpustakaan. *Ketiga*, belum adanya *reward and punishment*. *Keempat*, pembangunan perpustakaan bersifat parsial. *Kelima*, rendahnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Minimnya keberadaan perpustakaan di desa ini menjadi salahsatu tantangan. Menurut Nazaruddin (2002), perpustakaan desa kebanyakan lebih bersifat seremonial

daripada aktual. Akar masalah (*root of problem*) program pengembangan perpustakaan desa adalah kurang didasari konsep pengembangan perpustakaan yang ideal berbasis demografi masyarakat (Demographic Based). Masih banyak tahapan atau prosedur yang terabaikan, antara lain kajian kebutuhan pemakai (*user need assesment*), pemetaan profil masyarakat (*community profiling*), dan evaluasi kompetensi petugas perpustakaan.

Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora merupakan salah satu desa yang di dalamnya terdapat lembaga perpustakaan. Perpustakaan tersebut dikelola oleh Pondok Pesantren Miftakhul Amal, yang kini dalam keadaan belum berkembang. Perpustakaan tersebut belum dimanfaatkan secara luas oleh warga sekitar, hal ini sangat disayangkan karena fasilitas tersebut sebetulnya dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi warga desa. Oleh sebab itu perlu dilakukan optimalisasi keberadaan aset perpustakaan pondok pesantren yang diarahkan pada perluasan akses masyarakat sebagai bahan penambah pengetahuan. Dengan demikian, diharapkan keberadaan perpustakaan desa mampu menunjang peningkatan pendidikan masyarakat.

Penelitian ini berupaya melakukan kajian terhadap kebutuhan pengembangan perpustakaan di Desa Jiworejo agar lebih optimal menyediakan akses bahan bacaan/ pengetahuan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kondisi perpustakaan yang ada di Desa Jiworejo Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora saat ini?
- 2) Bagaimana upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan di Desa Jiworejo Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora?

- 3) Bagaimana upaya optimalisasi perpustakaan di Desa Jiworejo sebagai wahana pendidikan masyarakat?

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan, karena hasilnya langsung diaplikasikan. Menurut Daniel, et all (2005), penelitian terapan merupakan usaha yang dilancarkan untuk menjawab masalah dengan tujuan praktis dan jelas. Penelitian secara teknis metodologis termasuk dalam penelitian tindakan. Menurut Burns (Madya, 2009) penelitian tindakan adalah penelitian yang situasional, kontekstual, berskala kecil, praktis, terlokasi dan secara langsung dengan situasi nyata dalam dunia kerja. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Mudyahardjo (2008; 146) riset kualitatif merupakan sekumpulan metode-metode pemecahan masalah yang terencana dan cermat dengan desain yang cukup longgar, pengumpulan data lunak dan tertuju pada penyusunan teori yang disimpulkan melalui induktif langsung. Menurut Husaini dan Purnomo (2008;78) metode kualitatif lebih berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Fokus penelitian adalah pada analisis mengenai kondisi perpustakaan yang ada di desa tersebut, baik kondisi kelembagaan, sarana prasarana, koleksi, layanan dan pendapat masyarakat umum pengguna layanan. Subjek penelitian ini adalah para pengelola perpustakaan pondok pesantren, para santri sebagai pengguna, serta warga masyarakat desa yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan perpustakaan, yang keseluruhannya berjumlah sekitar 40 orang.

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara, kuesioner atau isian dan *Focussed Group Discussion* (FGD). Pedoman wawancara digunakan terhadap tokoh kunci pemerin-tah desa dan pengelola perpustakaan desa. Kuesioner digunakan terhadap masyarakat pengguna layanan. FGD melibatkan berbagai tokoh mulai dari aparat pemerin-tah daerah terkait, aparat pemerintah desa, pengelola perpustakaan desa dan masyara-kat pengguna layanan. Secara metodolo-gis, pelaksanaan FGD merupakan implementasi dari teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Menurut Daniel, et all (2005), metode PRA merupakan suatu teknik menyusun dan mengembangkan program yang operasional dalam pembangunan tingkat desa dengan memobilisasi sumber daya manusia dan alam setempat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan adanya 3 kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan yang saling terkait (Husaini dan Purnomo (2008; 88). Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan September – Nopember 2014.

HASIL

Perpustakaan yang ada di Desa Jiworejo merupakan perpustakaan milik Pondok Pesantren Miftakhul Amal. Ibu Suhartutik selaku pengelola Pondok Pesantren Miftakhul Amal menyampaikan bahwa sejarah perpustakaan di pondok pesantren bermula dari kebutuhan bahan bacaan kalangan santri yang berjumlah lebih dari 250 orang. Pada tahun 2007, untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan tersebut, Ibu Suhartutik menyampaikan permohonan bantuan kepada berbagai pihak yang memiliki kewenangan, termasuk rekannya Bapak Heru selaku

mantan pegawai Perpustakaan Daerah. Berdasarkan permintaan tersebut, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, atas rekomendasi Bapak Heru memberikan bantuan berupa 1.000 buku sebagai inventaris pondok pesantren. Buku-buku tersebut kemudian dikelola perpustakaan khusus Pondok Pesantren Miftakhul Amal yang bisa dimanfaatkan oleh santri.

Ruangan perpustakaan pada awalnya berada di bangunan bagian depan Pondok Pesantren Miftakhul Amal, sehingga mudah diakses oleh para santri. Namun terdapat kendala dimana banyak santri meminjam buku dan jarang yang kembali, bahkan pengurus perpustakaan pondok pesantren harus menyisir kamar-kamar santri untuk mendapatkan buku kembali. Karena banyak buku tidak kembali maka perpustakaan kemudian dipindah ke bagian tengah, akan tetapi kondisi ruangan tidak memenuhi syarat sehingga dipindah lagi di rumah induk dan diletakkan di lantai 2. Akses menuju ruangan ini sangat terbatas terutama untuk santri laki-laki sehingga jarang santri terutama santri laki-laki yang memanfaatkan perpustakaan tersebut.

Pengelola perpustakaan merupakan para santri dan mereka mampu menjalankan pengelolaan perpustakaan pondok pesantren dengan baik. Namun persoalannya ketika para pengelola tersebut telah lulus dan keluar dari pondok pesantren, tidak ada lagi tenaga penerus sedangkan pondok pesantren tidak memiliki program pelatihan untuk pengelolaan perpustakaan. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya sarana prasarana di ruang perpusakaan seperti tidak adanya meja dan kursi sebagai sarana baca. Koleksi buku-buku hanya ditempatkan di rak ala kadarnya tanpa penataan yang sesuai dengan kaidah keputakaan. Hampir tidak ada upaya pemeliharaan dan penambahan yang terprogram. Dengan demikian, pengelo-

laan Perpustakaan Pondok Pesantren Miftakhul Amal dapat dikatakan stagnan.

Oleh sebab itu, secara umum keberadaan perpustakaan di Pondok Pesantren Miftakhul Amal belum memberikan dampak luas pada penambahan pengetahuan baik para santri maupun warga. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya upaya pengelolaan dan pengembangan. Selama ini perpustakaan hanya dikelola secara internal, dimanfaatkan oleh para santri dan sebagian ibu-ibu jamaah pengajian. Dengan kondisi demikian, maka dibutuhkan perbaikan di segala bidang, baik kelembagaan, SDM pengelola, penambahan koleksi, sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan perlu segera dilakukan.

Oleh sebab itu, hasil FGD yang telah dilakukan mengamanatkan adanya perubahan tata kelola perpustakaan. Perpustakaan semestinya dikelola bersama oleh pondok pesantren dan masyarakat, dengan dukungan pemerintah desa dalam bentuk Perpustakaan Masyarakat. Pengelolaan perpustakaan harus melibatkan segenap stakeholder di desa serta membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat desa.

PEMBAHASAN

1. Kendala dan solusi

Menurut responden ada beberapa kendala utama yang selama ini menghambat pengembangan perpustakaan pondok pesantren. Permasalahan tersebut terdiri dari masalah koleksi, pendanaan, sarana prasarana, SDM dan pengelolaan, akses dan keanggotaan, serta budaya baca masyarakat.

Pada persoalan keterbatasan koleksi, adalah sedikitnya jumlah buku, kurangnya pemeliharaan dan penambahan koleksi, serta jenis koleksi yang ada belum memenuhi kebutuhan pembaca. Misalnya sebagian besar masyarakat adalah petani, namun buku pertanian masih sangat

kurang. Kendala lainnya yang dihadapi perpustakaan pondok pesantren adalah minimnya komitmen santri untuk menjaga koleksi karena banyak buku yang hilang atau tidak dikembalikan ketika mereka meminjam sehingga pengurus kadang harus melakukan pemeriksaan di kamar.

Pada persoalan anggaran, sangat jelas bahwa memang tidak ada alokasi khusus dari pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan perpustakaan, karena memang keterbatasan dana pondok pesantren. Selama ini kebutuhan-kebutuhan pengembangan tergantung dari bantuan pemerintah. Di sisi lain pengelola tidak memiliki alternatif lain dalam upaya pemenuhan anggaran untuk operasional dan pengembangan perpustakaan. Sehingga perpustakaan berjalan dengan berbagai keterbatasan, bahkan akhirnya mengalami stagnasi.

Persoalan ketiga adalah pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Posisi yang berada di rumah pengelola pondok pesantren relatif membatasi akses pengguna perpustakaan. Kemudian di tempat tersebut hanya terdapat rak dan buku, tidak tersedia meja baca dan kursi serta perabot pendukung lainnya. Prasarana pendukung juga belum tersedia dengan baik. Oleh karena keterbatasan sarana dan prasarana ini, maka aktivitas perpustakaan juga mengalami hambatan.

Permasalahan selanjutnya adalah kurang pengetahuan tentang pengelolaan perpustakaan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa petugas pengelola perpustakaan sebelumnya adalah para santri yang dilatih di berbagai tempat. Mereka bisa bekerja melayani dengan cukup baik. Namun ketika para santri yang dilatih itu lulus, tidak ada upaya regenerasi, sehingga tidak ada lagi santri yang mengelola perpustakaan.

Permasalahan berikutnya adalah masalah akses keanggotaan. Seseorang bisa mengakses layanan perpustakaan ialah ketika ia menjadi anggota. Namun pada perpustakaan pondok pesantren, warga desa belum menjadi anggota. Karena belum menjadi anggota maka warga enggan mengunjungi perpustakaan atau bahkan memanfaatkan bahan bacaan di perpustakaan. Warga yang belum menjadi anggota ini menjadi hambatan bagi kemanfaatan perpustakaan untuk menambah pengetahuan warga desa.

Permasalahan yang terakhir adalah mengenai budaya baca masyarakat. Dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah memang rata-rata budaya baca masih rendah. Terungkap bahwa masyarakat masih belum mengetahui manfaat perpustakaan di desa mereka. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat membaca kepada masyarakat juga menjadi salahsatu penyebab rendahnya budaya baca masyarakat. Namun di sisi lain sebagian masyarakat mulai antusias dengan keberadaan perpustakaan.

Berdasarkan realitas di atas, serta pendalaman melalui FGD, ada beberapa masukan utama terkait perbaikan perpustakaan di Desa Jiworjo. Masukan untuk perbaikan itu dapat dikelompokkan menjadi aspek manajemen pengelolaan, koleksi, pendanaan, sarana prasarana, SDM, akses dan keanggotaan, serta budaya baca masyarakat.

Dari segi manajemen pengelolaan, terdapat beberapa usulan responden yang berbeda. Di satu sisi sebagian responden menyatakan bahwa sebaiknya perpustakaan dikelola oleh pondok pesantren dan masyarakat agar hubungan santri dan masyarakat berjalan baik. Pendapat ini didukung oleh mayoritas responden. Pendapat kedua adalah sebaiknya baik pondok pesantren maupun desa memiliki perpustakaan sendiri-sendiri. Kemudian

pendapat ketiga adalah pengelolaan perpustakaan sebaiknya oleh pondok pesantren saja, karena sejarahnya memang milik pondok pesantren. Sedangkan pendapat terakhir adalah perpustakaan dikelola oleh masyarakat saja. Berdasarkan hasil diskusi dalam FGD, maka pendapat pertama lebih menguat, dimana pengelolaan atau manajemen perpustakaan nanti akan diperluas menjadi perpustakaan masyarakat. Pengelolaan merupakan kerjasama antara pondok pesantren dan masyarakat. Pengelola perpustakaan berasal dari para santri dan warga yang memiliki komitmen. Sementara di sisi lain tugas pemerintah desa adalah memberikan dukungan dan legalisasi kelembagaan melalui peraturan desa terkait pendirian perpustakaan masyarakat tersebut. Pemerintah desa juga diharapkan memberikan dukungan sarana dan prasarana, koleksi dan kebutuhan operasional serta pengembangan perpustakaan. Selain itu, swadaya masyarakat juga perlu ditingkatkan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam diskusi di atas, bahwasannya perubahan pengelolaan perpustakaan di Desa Jiworejo sebaiknya dilakukan dengan kerjasama antara pondok pesantren, masyarakat dan pemerintah desa. Semua pihak di desa baik masyarakat, pondok pesantren maupun pemerintah desa bertanggungjawab terhadap keberlangsungan perpustakaan desa. Untuk pengelolaan perlu dibentuk pengurus independen berasal dari unsur pondok pesantren dan masyarakat, sementara pemerintah desa berperan sebagai pembina. Di sisi lain pengelola yang sudah dibentuk nantinya bertanggungjawab mencari dukungan lebih luas dari donatur baik pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka mengembangkan perpustakaan.

Untuk perbaikan koleksi atau bahan bacaan perpustakaan, ada beberapa

usulan yang disampaikan peserta FGD. *Tahap pertama* adalah memahami apa saja kebutuhan masyarakat, dalam hal ini jangkauan pelayanan harus meliputi semua komponen desa, serta memahami bahan bacaan apa yang dibutuhkan. *Tahap kedua* adalah melakukan perencanaan kebutuhan penambahan dan penataan koleksi yang sudah ada sebelumnya dalam klasifikasi sesuai kebutuhan masyarakat. *Tahap ketiga* adalah identifikasi pihak-pihak yang dipandang bisa memberikan bantuan. Dalam tahap ini swadaya masyarakat dan donatur personal juga perlu diperhitungkan. *Tahap selanjutnya* adalah melakukan penambahan buku. Dalam hal ini baik Dinas Pendidikan, Bappeda maupun Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blora siap memberikan dukungan. Melalui program pengembangan Taman Belajar Masyarakat (TBM) sebagai penanggulangan buta huruf, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora siap membantu dan memfasilitasi penambahan koleksi bahan bacaan tersebut. Kemudian Bappeda Kabupaten Blora siap mendukung kebijakan dan alokasi anggaran. Selain meminta dukungan dari berbagai pihak, pengelola juga perlu menyusun rencana alokasi anggaran untuk penambahan koleksi bacaan baru.

Penambahan koleksi yang dibutuhkan masyarakat adalah berbentuk buku-buku, majalah dan bahan bacaan lainnya. Adapun tema yang dibutuhkan terutama tentang pertanian, keagamaan, keterampilan, kesehatan, bisnis rumah tangga, majalah, buku cerita anak serta buku-buku dan bahan bacaan umum lainnya yang berpotensi meningkatkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja.

Pada aspek pembiayaan, diharapkan terdapat bantuan terutama dari pemerintah daerah. Segenap unsur desa, dalam hal ini pemerintah desa, masyarakat dan pondok pesantren merupakan pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap

pemenuhannya. Pembiayaan perpustakaan dalam hal ini meliputi biaya operasional harian seperti listrik, kebutuhan ATK dan operasional pengelola, serta biaya pengembangan meliputi penambahan koleksi dan sarana prasarana. Pengelola yang telah dibentuk nantinya juga bertanggungjawab mencari sumber pendanaan dari pihak lain seperti *Corporate Social Responsibility/ CSR* (Pertamina, Migas) atau lembaga bisnis dan sosial lainnya.

Sarana prasarana merupakan unsur penunjang yang sangat penting. Lokasi dan kondisi ruang perpustakaan sangat mempengaruhi minat pembaca. Oleh sebab itu ada beberapa usulan yang disampaikan dalam diskusi. Pada prinsipnya masyarakat menginginkan lokasi perpustakaan yang mudah dijangkau, terbuka dan mudah dikunjungi. Dalam hal ini telah terdapat ruangan di salahsatu bangunan sekolah yaitu gedung serbaguna yang bisa digunakan. Gedung tersebut juga sering dimanfaatkan untuk pengajian ibu-ibu, sehingga relatif mudah diakses, mudah dikunjungi masyarakat. Lokasi tersebut juga berada di tengah-tengah Desa Jiworejo sehingga mudah dijangkau. Hal ini sesuai dengan kehendak warga dimana lokasi seyogyanya terletak di tengah-tengah desa. Warga juga menghendaki agar ruangan tidak bising, sehingga kondusif untuk aktivitas perpustakaan. Sarana pendukung yang harus disediakan adalah meja baca, tempat duduk, lemari buku, meja layanan dan perangkat pendukung lainnya. Pihak pengelola, pemerintah desa dan masyarakat diharapkan bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut.

Fasilitas tambahan yang sangat dibutuhkan adalah akses internet dan perangkatnya. Akses internet dipandang sebagai kebutuhan dan daya tarik masyarakat untuk berkunjung. Dalam hal ini terdapat kesulitan terkait jaringan telepon yang terbatas. Untuk mengatasi

hal tersebut, Bappeda memberikan informasi mengenai peluang mengembangkan jaringan internet tersebut melalui PT. Telkom. Dalam hal ini pengelola perpustakaan atau Pemerintah Desa juga bisa mengajukan permohonan agar layanan internet keliling di Kecamatan Jiken untuk didatangkan di Desa Jiworejo.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengelola, terdapat berbagai macam usulan terkait perekrutan dan pelatihan tenaga pengelola. Untuk perekrutan tenaga pengelola telah disepakati bahwa akan dilakukan perekrutan dari santri dan warga yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam pengembangan perpustakaan. Ibu Suhartutik akan merekrut ibu-ibu muda yang memiliki pengetahuan serta santri sebagai pengurus atau pengelola perpustakaan. Sementara sebagian lagi berpendapat bahwa pemerintah desa perlu dilibatkan, dalam hal ini pelibatangannya sebagai fasilitator atau pembina. Meskipun di sisi lain ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengelola adalah masyarakat saja, di sisi lain juga ada yang berpendapat pengelola adalah pemerintah desa dan pondok pesantren. Namun kemudian disepakati bahwa pengelola adalah masyarakat yang memang benar berdomisili tetap di Desa Jiworejo dan pengelola tersebut benar-benar mempunyai niat yang tulus, kemudian dibantu oleh santri. Hal ini berdasarkan pengalaman bahwa pada awalnya santri telah dilatih, namun begitu lulus, pindah dari pondok sehingga tidak ada yang mengurus lagi. Dengan pengurus yang berdomisili tetap maka tidak ada kekhawatiran terjadi kekosongan pengelola atau pengurus perpustakaan.

Sedangkan untuk memperluas akses warga, semua sepakat bahwa semua warga desa dan pondok pesantren harus memiliki akses yang sama terhadap perpustakaan. Disepakati bahwa semua

warga bisa menjadi anggota dengan cara mengumpulkan foto dan data diri, kemudian dibuat kartu anggota. Dalam pelayanan terhadap anggota, diberikan layanan membaca di tempat dan peminjaman. Anggota tidak dipungut biaya untuk mendapatkan layanan perpustakaan tersebut. Dengan pelayanan demikian diharapkan banyak warga yang antusias dan menggunakan fasilitas perpustakaan.

Kemudian sebagai aspek nonteknis dalam upaya pengembangan perpustakaan desa maka perlu digalakkan budaya membaca. Masyarakat merasa bahwa mereka masih belum menyadari arti pentingnya membaca dan keuntungan keberadaan perpustakaan di desa mereka. Dengan demikian perlu dilakukan penyuluhan atau pembudayaan membaca di masyarakat desa. Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mengusulkan kepada pengurus perpustakaan atau pemerintah desa untuk meminta bantuan perpustakaan keliling agar secara berkala berkunjung ke Desa Jiworejo untuk meningkatkan budaya membaca.

2. Pembenahan yang sudah dilakukan

Berdasarkan berbagai analisis kondisi di atas, maka ada beberapa masukan untuk perubahan terhadap pengelolaan perpustakaan. Pembenahan akan dilakukan bertahap mulai dari penyiapan kelembagaan, penyiapan SDM, penambahan koleksi, penataan sarana dan prasarana, serta perbaikan manajemen pengelolaan.

Pada saat berjalannya penelitian ini pengelola perpustakaan mulai melakukan pembenahan dengan memindahkan koleksi buku dari pondok pesantren lama ke gedung serbaguna di sekolah SMP/SLTA pondok yang lebih representatif. Gedung tersebut juga sering digunakan untuk pertemuan atau aktivitas pengajaran

ibu-ibu Desa Jiworejo sehingga bersifat terbuka dan mudah diakses.

Tahap awal adalah penataan pengelolaan dengan melibatkan masyarakat, dimana sebagian masyarakat yang potensial akan dikader dan dilatih bersama sebagian santri untuk menjadi pengelola perpustakaan. Pemerintah desa akan memberikan dukungan dalam hal legalitas atau regulasi sehingga keberadaan perpustakaan menjadi lebih formal. Konsep yang dikembangkan adalah perpustakaan masyarakat, sehingga bisa dikelola dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Dalam pemenuhan penambahan koleksi dilakukan dengan meminta bantuan pemerintah, dunia usaha dan swadaya masyarakat. Langkah ini akan dilakukan oleh pengurus perpustakaan yang terbentuk nantinya. Beberapa penambahan koleksi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah bahan bacaan terkait pertanian, kerajinan, industri mikro dan kecil, atau industri pengolahan, keterampilan, bahan bacaan religius, remaja dan pendidikan dasar.

Untuk mendukung aktivitas perpustakaan, sudah dilakukan beberapa perbaikan. Fasilitas baca di ruangan perpustakaan yang baru sudah ditambahkan meja kursi dan komputer. Selain itu penataan rak juga sudah dilakukan dengan baik, dengan labeling bahan bacaan yang lebih baik.

Perbaikan juga dilakukan dengan memperluas aksesibilitas. Sasaran pembaca ialah seluruh masyarakat, terutama ibu-ibu, remaja putri dan anak-anak. Semua lapisan masyarakat berhak menjadi anggota dan bisa membaca di tempat atau meminjam buku tanpa dikenakan biaya, namun tetap membuka kesempatan bagi mereka yang ingin membantu (swadaya).

Beberapa perbaikan kecil tersebut merupakan langkah awal yang menjadi titik tolak perubahan pengelolaan perpustakaan.

Dengan langkah awal tersebut setidaknya penelitian ini telah memberikan dampak perubahan sebagaimana tujuan yang diemban dengan metode partisipatif. Peneliti terjun langsung dalam perumusan dan memberikan masukan analisis pada berbagai segi yang dibutuhkan untuk perbaikan. Langkah-langkah perbaikan berikutnya membutuhkan dukungan lebih luas karena memerlukan sumberdaya yang cukup besar.

3. Perbaikan yang masih dibutuhkan

Perkembangan sebagaimana dikemukakan di atas masih memerlukan langkah lanjutan yang dilakukan bersama antara pondok pesantren, pemerintah desa dan masyarakat. Pengelola perpustakaan pondok pesantren memahami kondisi tersebut dan berkeinginan menjalin kerjasama atau melakukan upaya pembukaan perpustakaan. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan ada peluang untuk mengalihkan pengelolaan dari pondok pesantren menjadi kerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga perhatian dan dukungan lebih luas.

Perlu koordinasi dan pembahasan lebih lanjut untuk membahas pembaharuan pengelolaan perpustakaan di Desa Jiworejo. Dalam hal ini pengelola Perpustakaan Pondok Pesantren sudah menjalin hubungan dengan Kepala Desa dalam rangka pengembangan lebih lanjut perpustakaan menjadi lebih terbuka. Pada intinya Pemerintah Desa Jiworejo menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi berdirinya perpustakaan masyarakat di Desa Jiworejo. Kepala Desa Jiworejo menyambut baik keinginan pengelola perpustakaan pondok pesantren untuk mengembangkan perpustakaan lebih luas. Pemerintah akan memberikan dukungan berupa fasilitasi regulasi dan kebijakan serta mendorong partisipasi masyarakat.

Namun demikian, untuk mengembangkan lebih jauh perpustakaan dibutuhkan dukungan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana serta pemenuhan koleksi yang memadai. Dengan pelibatan berbagai stakeholder diharapkan pengembangan perpustakaan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, selain pemerintah desa dan masyarakat desa, dibutuhkan juga bantuan dari pemerintah daerah, baik Kabupaten Blora maupun Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penjelasan Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Bapak Widodo bahwa Dinas Pendidikan memiliki program pengembangan Taman Belajar Masyarakat (TBM) yang memiliki peran pemberantasan buta huruf dan penyediaan bahan bacaan, sehingga program tersebut bisa sejalan dengan pengembangan perpustakaan desa. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Bappeda Kabupaten Blora telah memiliki komitmen dalam pengembangan perpustakaan Desa Jiworejo.

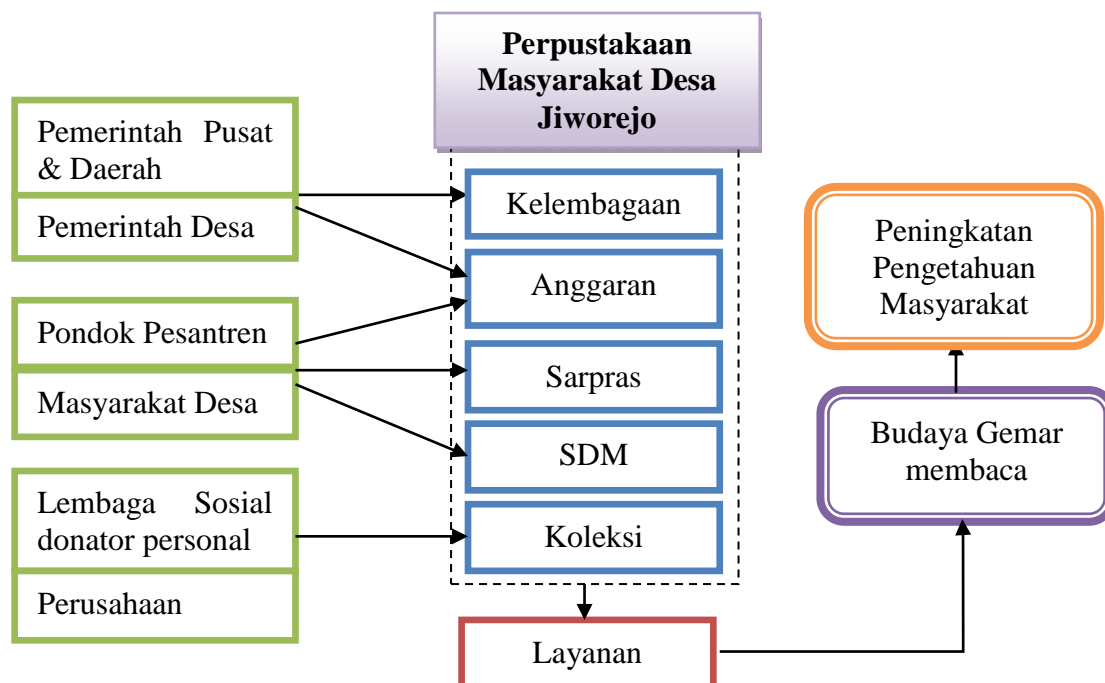
Masukan lainnya dari masyarakat adalah terkait penambahan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan, tempat yang mudah terjangkau dan terbuka, prosedur peminjaman dan keanggotaan yang mudah, pengelolaan yang lebih baik, sarana dan prasarana yang memadai serta adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak, serta penyuluhan tentang budaya membaca pada masyarakat. Masyarakat juga mengusulkan adanya jaringan internet yang masuk sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat. Dinas Pendidikan juga mengusulkan agar pengelola perpustakaan meminta bantuan adanya perpustakaan keliling yang masuk ke Jiworejo serta layanan internet kecamatan agar masuk ke Desa Jiworejo.

Berdasarkan masukan-masukan tersebut, maka perpustakaan pondok pesantren akan dialihkan menjadi perpustakaan masyarakat. Perpustakaan tersebut akan dikelola bersama pondok pesantren, masyarakat dan pemerintah desa dengan bantuan dinas terkait. Lokasi perpustakaan akan berada di gedung yang mudah dijangkau dengan pemenuhan sarana prasarana yang memadai, yaitu di gedung serba guna sekolah Pondok Pesantren Miftakhul Amal.

Untuk mewujudkan pengembangan tersebut, Pemerintah Desa Jiworejo beserta pengelola perpustakaan pondok pesantren perlu melakukan komunikasi dengan instansi terkait, terutama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pendidikan dan Bappeda Kabupaten Blora. Untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak tersebut diperlukan upaya pendekatan dan forum khusus terkait pengembangan perpustakaan.

Pengembangan perpustakaan di Desa Jiworejo dapat dikonsepsikan sebagai sinergi antara masyarakat, pemerintah desa dan pondok pesantren dalam pengelolaan bersama. Pemerintah desa bertanggungjawab memberikan fasilitasi dan legalitas, pondok pesantren memberikan sarana gedung dan koleksi, serta menjalankan pengelolaan bersama masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat juga diharapkan mengeluarkan swadaya untuk pengembangan perpustakaan.

Selain itu, peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan dalam memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan anggaran, koleksi, teknis dan nonteknis. Stakeholder lain adalah donatur pribadi dan perusahaan yang berada di sekitar Kabupaten Blora. Kerangka pengembangan Perpustakaan Masyarakat Desa Jiworejo dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 1: Model Perbaikan Perpustakaan Masyarakat Desa Jiworejo

4. Pemberdayaan Perpustakaan untuk Pendidikan Masyarakat

Sebagaimana dikemukakan Mudayahardjo (2008;46) bahwa pendidikan dalam arti luas merupakan proses belajar setiap sepanjang hidup seseorang. Menurut Arif Rohman (2009;1) pendidikan masyarakat merupakan upaya meningkatkan mutu kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan belajar. Peran pendidikan masyarakat adalah menyiapkan sumberdaya manusia yang mampu berpikir secara mandiri dan kritis (Iman, 2004; 3).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, salah satu sarana utama di masyarakat adalah perpustakaan. Perpustakaan menyediakan sumberdaya untuk proses belajar yang terbuka atau dapat diakses oleh masyarakat umum. Di pedesaan, keberadaan perpustakaan akan sangat membantu karena wilayah pedesaan mengalami keterbatasan akses terhadap sumber pengetahuan. Dengan

keberadaan perpustakaan maka akses masyarakat desa terhadap pengetahuan dapat ditingkatkan.

Untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan masyarakat, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah ini perlu dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pengelola Perpustakaan Masyarakat di Desa Jiworejo dalam rangka mengoptimalkan fungsi perpustakaan.

Pertama adalah meningkatkan kapasitas perpustakaan. Kapasitas dalam hal ini menyangkut ketersediaan koleksi, sarana prasarana dan pelayanan yang baik. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan dukungan sumber daya dari berbagai pihak. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kegigihan pengelola perpustakaan untuk menggali dukungan sangat menentukan keberhasilan upaya ini. Langkah ini akan dilaksanakan oleh pengelola perpustakaan masyarakat sesuai dengan kesepakatan dalam FGD.

Kedua adalah memperluas jangkauan pelayanan dan mempermudah aksesibilitas warga untuk menikmati layanan perpustakaan. Keanggotaan perpustakaan harus diperluas dan dipermudah, serta masyarakat merasa beruntung menjadi anggota perpustakaan. Sebisa mungkin tidak memungut biaya dalam memberikan pelayanan. Langkah ini dilakukan dengan memperluas keanggotaan perpustakaan sesuai hasil FGD.

Ketiga adalah mengupayakan layanan tambahan yang menarik minat warga untuk berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan perlu menyusun rancangan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang bertujuan menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Perpustakaan bisa difungsikan sebagai wahana belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidupnya. Kegiatan bisa berupa meningkatkan kapasitas produktif (keterampilan usaha) atau meningkatkan kualitas hidup yang bersifat rekreatif dan religius. Kegiatan konkret yang bisa dilaksanakan adalah terkait keterampilan wirausaha, kesenian atau hiburan maupun pendalaman agama.

Kegiatan keterampilan wirausaha berupa keterampilan yang bertujuan meningkatkan pendapatan seperti menjahit, memasak atau kerajinan. Selain itu bisa juga dilakukan pelatihan manajemen wirausaha. Bahan-bahan atau materi pelatihan merupakan sumber bacaan yang ada di perpustakaan. Jika dibutuhkan bisa mendatangkan bahan bacaan tambahan dan sekaligus mengundang pakar yang kompeten.

Kegiatan lainnya bisa berupa mengulas bersama isi buku-buku atau bahan bacaan yang ada di perpustakaan secara berkala. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kecakapan hidup atau memperbaiki pengetahuan dan perilaku

hidup. Bahan bacaan atau materi yang diulas adalah terkait dengan kesehatan, keagamaan, seni budaya, pengetahuan dan wawasan umum.

Kegiatan pelengkap yang disediakan perpustakaan adalah yang bersifat rekreatif sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia modern. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa menonton film bersama atau pertunjukan seni untuk menarik minat anak-anak dan remaja serta orang tua agar datang dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Tentunya pelaksanaan kegiatan di atas sebagai layanan tambahan perpustakaan tidak terlepas dari kebutuhan warga dan kemampuan pengelola perpustakaan. Oleh sebab itu terlebih dahulu bisa dilakukan analisis atau pendalaman mengenai kebutuhan masyarakat sekitar. Hasil analisis tersebut kemudian disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan. Jika memungkinkan maka pengelola meminta bantuan pemerintah, pelaku usaha atau donatur personal untuk memenuhi kebutuhan layanan tambahan tersebut.

SIMPULAN

1. Kondisi Perpustakaan Desa Jiworejo Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora saat ini adalah dalam keadaan stagnan atau mengalami kemandegan, dikarenakan adanya kondisi: a). minimnya kerjasama dengan pihak lain, b). minimnya sumberdaya yang dialokasikan baik tenaga, sarana dan prasarana maupun anggaran. c). minimnya akses masyarakat desa terhadap perpustakaan, d). koleksi yang kurang memadai, e). layanan yang kurang menarik, serta f). kurangnya dukungan budaya baca.
2. Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Perpustakaan Desa Jiworejo Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora adalah: a). menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di desa, yaitu pemerintah desa,

pondok pesantren dan masyarakat, b). menggali potensi sumberdaya baik tenaga, sarana dan prasarana maupun anggaran melalui kerjasama yang dibangun, c). membuka akses yang lebih luas kepada segenap masyarakat dengan cara membuka keanggotaan secara luas, d). penambahan koleksi dilakukan dengan menggali berbagai sumber baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swadaya masyarakat dan unsur desa lainnya, e). penambahan layanan yang dimaksudkan untuk menambah daya tarik perpustakaan, membuat orang tertarik untuk mengunjungi perpustakaan, dan f). penyuluhan yang dilakukan untuk meningkatkan budaya baca masyarakat.

3. Upaya optimalisasi perpustakaan di Desa Jiworejo sebagai wahana pendidikan masyarakat adalah: a). penambahan koleksi sesuai kebutuhan masyarakat, b). perpustakaan menyelenggarakan program dan kegiatan yang bertujuan menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan, c). kegiatan yang dilakukan bisa berupa pelatihan maupun mengulas bersama isi buku-buku atau bahan bacaan, dan d). mengadakan kegiatan pendukung seperti menonton film bersama atau pertunjukan seni untuk menarik minat anak-anak dan remaja.

SARAN

1. Mengadakan pertemuan antara Pemerintah Desa Jiworejo, masyarakat dan pengelola pondok pesantren untuk menyatakan status perpustakaan diperluas menjadi perpustakaan masyarakat. Pemerintah Desa memberikan dukungan legal formal, berpartisipasi dalam

pengelolaan, pondok pesantren menyerahkan sumberdaya perpustakaan untuk dikelola bersama;

2. Membentuk struktur pengelola/pengurus perpustakaan yang merupakan gabungan dari Pemerintah Desa, masyarakat dan pondok pesantren dengan pembagian tugas Pemerintah Desa sebagai pembina, Ketua adalah perwakilan masyarakat didampingi wakil ketua dari pondok pesantren, sekretariat dari pondok pesantren serta seksi pengelolaan dan pelayanan yang melibatkan masyarakat dan pondok pesantren;
3. Menyusun rencana aksi menggali dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan dan donatur melalui berbagai even maupun proposal. Untuk keperluan ini dibentuk panitia atau tim khusus yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat dan pengelola pondok pesantren;
4. Memulai usaha penambahan koleksi melalui swadaya dan bantuan pihak terkait melalui proposal maupun berbagai event atau jaringan;
5. Penambahan layanan berupa pemasangan jaringan internet mandiri atau meminta bantuan internet kecamatan keliling, pelatihan membaca bagi buta huruf dan pelatihan keterampilan;
6. Perbaikan sarana melalui penambahan perabotan seperti meja, kursi, alat tulis, kipas angin, penerangan, tempat ibadah, kamar kecil dan sejenisnya;
7. Penyuluhan budaya baca dengan meminta bantuan perpustakaan keliling atau instansi di tingkat Kabupaten Blora maupun Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, Moehar, Darmawati, Niieldalina. 2005. *PRA, Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*, Jakarta, Bumi Aksara
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. *Psikologi Belajar*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nazaruddin. *Peran Perpustakaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. <http://adab.ar-raniry.ac.id>, 30 September 2012
- Madya, Suwarsih. 2009. *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan*, Bandung, Alfabeta
- Mudyahardjo, Redja, Dr, 2008, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Pasaribu, Adin Bondan. *Logical Framework Pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Kegemaran Membaca*, <http://edukasi.kompasiana.com>, 07 April 2014
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta
- Surakhmad, Winarno. *Pendidikan Nasional; Strategi dan Tragedi*. Kompas, Jakarta
- Iman, Muis Sad. 2004. *Pendidikan Partisipatif*. Safiria Insania Press, Yogyakarta
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance; 20 Parakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Akasara, Jakarta
- Dokumen Hukum**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke IV)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa / Kelurahan
- Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Perpustakaan Nasional RI 2001